

Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Ekoteologi Hindu di Desa Wisata Suranadi Kabupaten Lombok Barat

Ni Putu Rika Sukmadewi¹, Ni Nyoman Harnika², I Made Weda Satia Negara³

¹Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kututan, Singaraja, Indonesia

²Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataran, Indonesia

³Politeknik Nasional Denpasar, Indonesia

¹rikasukmadewi@mpukuturan.ac.id

Abstract

Tourism villages, as a representation of Community-Based Tourism (CBT), position local communities as the primary actors in destination management. This is closely related to local communities' active engagement in preserving cultural heritage while simultaneously improving the village economy. Suranadi Village, a cultural tourism village located in West Lombok Regency, possesses strong cultural and ecological capital; however, it faces challenges in the form of declining competitiveness caused by weak institutional systems, limited infrastructure, and the risk of cultural commodification. This study aims to formulate a development strategy for tourism destinations based on Hindu ecotheology in Suranadi Village. This research employs a qualitative method with a case study approach. The results indicate that Suranadi Village possesses unique capital in the form of a temple complex featuring Panca Tirta (five sacred water springs) within a protected forest landscape, which can serve as the basis for Hindu ecological principles. Suranadi Village has a distinctive profile as a locus of Hindu spirituality on Lombok Island, intrinsically linked to a protected forest area rich in flora and fauna. Procedurally, the urgent initial steps include documenting physical and non-physical facilities, developing a zoning map, and formulating a code of ethics agreed upon by the traditional stakeholders (temple priest) of Suranadi. The study concludes that the integration of Hindu culture and ecology can be established through ecological zoning based on the tri mandala concept, visitor codes of conduct, and the strengthening of institutional capacity. This establishment is expected to restore competitiveness, safeguard the authority of cultural heritage, and simultaneously strengthen the conservation of the protected forest.

Keywords: *Development Strategy; Tourism Destination; Hindu Ecotheology; Tourism Village*

Abstrak

Desa wisata sebagai representasi *Community Based Tourism* (CBT) menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan destinasi. Hal ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat lokal yang aktif menjaga kelestarian budaya sekaligus dapat meningkatkan perekonomian Desa. Salah satu Desa Wisata budaya, Desa Suranadi yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat memiliki modal budaya dan ekologis yang kuat, namun menghadapi tantangan berupa menurunnya daya saing yang disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan, keterbatasan infrastruktur, hingga risiko komodifikasi budaya. Adapun tujuan penelitian ini untuk merumuskan strategi pengembangan destinasi wisata berbasis ekoteologi Hindu di Desa Suranadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Suranadi

memiliki modal unik berupa kawasan pura dengan *Panca Tirta* (lima sumber mata air suci) dalam lanskap hutan lindung yang dapat dijadikan basis ekologi Hindu. Desa Suranadi memiliki profil unik sebagai lokus spiritualitas Hindu di Pulau Lombok yang terikat dengan kawasan hutan lindung yang kaya satwa dan fauna. Secara operasional langkah awal yang mendesak adalah mencatat fasilitas fisik dan nonfisik, menyusun peta zonasi, merumuskan protokol tata etika yang disepakati pemangku adat Suranadi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi budaya dan ekologi Hindu dapat ditetapkan melalui zonasi ekologis berbasis *Tri Mandala*, pola tata etika wisatawan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Penetapan tersebut akan memulihkan daya saing, menjaga otoritas warisan budaya sekaligus memperkuat konservasi hutan lindung.

Kata Kunci: Strategi Pengembangan; Destinasi Wisata; Ekoteologi Hindu; Desa Wisata

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang memberikan stimulus signifikan melalui pergerakan wisatawan dan pengeluaran mereka pada sektor transportasi, akomodasi, rekreasi, serta produk ekonomi kreatif local. Dampak ekonomi ini tidak hanya bersifat langsung tetapi juga berantai (*multiplier effect*), sehingga durasi tinggal wisatawan menjadi indikator krusial bagi keberhasilan sebuah destinasi; semakin lama masa tinggal, semakin besar peluang penyerapan manfaat ekonomi oleh masyarakat setempat (McKercher & Du Cros, 2002).

Di Indonesia, kebijakan nasional Kementerian Pariwisata RI, Tahun 2018, mengatur ulang regulasi visa dan peningkatan konektivitas, hal ini mampu mendorong arus wisatawan mancanegara, namun perhatian pengembangan kini bergeser ke penguatan basis lokal melalui program Desa Wisata dan pengembangan *homestay* yang menonjolkan autentisitas budaya dan nilai kekeluargaan (Richards, 2007). Desa wisata merupakan representasi dari konsep *Community Based Tourism* (CBT) yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan destinasi, dengan tujuan menjaga kelestarian nilai budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga (Tosun, 2000; Goodwin & Santilli, 2009).

Prinsip pembangunan berkelanjutan menuntut keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga manfaat pariwisata dapat dinikmati oleh generasi kini dan nanti (Bramwell & Lane, 2011). Di Pulau Lombok, pengakuan internasional terhadap potensi pariwisata termasuk penguatan citra sebagai destinasi ramah halal membuka peluang pengembangan wisata berbasis warisan budaya dan ekologi secara lebih masif (Henderson, 2016; Zahra & Ryan, 2007). Dalam lingkup Kabupaten Lombok Barat, Desa Suranadi telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kawasan Desa Wisata, menandai posisi strategisnya dalam peta pengembangan pariwisata daerah.

Meskipun memiliki modal budaya dan ekologis yang kuat, perjalanan Desa Suranadi sebagai destinasi unggulan menghadapi tantangan yang kompleks. Menurunnya daya saing dan stagnasi kreativitas masyarakat dibandingkan dengan masa kejayaan pada era 1990-an menunjukkan adanya masalah struktural dan pengelolaan. Kurangnya sosialisasi konsep Desa Wisata, beberapa akses yang rusak, serta kelemahan dalam manajemen organisasi pengelola seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) (Suprpto, 2015; Putra & Suryani, 2019). Di samping keterbatasan tersebut, integrasi antara perlindungan warisan budaya

Hindu yang melekat pada situs-situs spiritual dengan pelestarian ekosistem hutan lindung di kawasan Suranadi menghadirkan dilema tata kelola yang sensitif secara sosial-religius, mengingat mayoritas masyarakat Sasak di sekitarnya beragama Islam. Konflik nilai, potensi marginalisasi kelompok pemilik warisan, dan risiko komodifikasi budaya menjadi isu yang perlu dianalisis secara mendalam (Cohen, 1988; Picard, 1996; Timothy, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan CBT bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, mekanisme distribusi manfaat, serta strategi pemasaran yang mempertahankan autentisitas (Tosun, 2006). Penelitian manajemen destinasi berbasis pariwisata berkelanjutan dalam mengelola daya tarik wisata dilakukan Paresashvili (2016) yang menekankan keterlibatan semua pihak dalam pengembangan daya tarik wisata sangat mempengaruhi kualitas sebuah daya tarik wisata. Korov (2024) dalam penelitiannya menekankan pada identitas budaya dan religius dalam meningkatkan daya saing destinasi.

Pertiwi et al., (2023) menjelaskan bahwa pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot berdasarkan atas *Planning, Organizing, Actuating, controlling*. Daya tarik wisata Tanah Lot juga berlandaskan pada aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek lingkungan sejalan dengan konsep *Tri Hita Karana*. Namun, studi yang menggabungkan integrasi nilai-nilai Hindu dengan potensi ekologis hutan lindung dalam konteks Desa Wisata Suranadi masih terbatas, sehingga penelitian ini mengisi celah empiris dan konseptual dengan menawarkan model strategi pengembangan destinasi yang sensitif budaya dan berkelanjutan secara ekologis (McKercher, 2002).

Urgensi penelitian secara praktis memperlihatkan bahwa Desa Suranadi memerlukan peta jalan pengembangan yang komprehensif terkait pemasaran dan promosi berskala regional dan internasional sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Bramwell & Lane, 2011; Hall, 2008). Bertalian dengan penelitian ini, Rozi & Lemy (2023) meneliti model tata kelola pariwisata di kawasan candi Borobudur. Model pengelolaan yang direkomendasikan pada kawasan Borobudur sebagai upaya penyebaran kunjungan dilakukan dengan *model single management single destination* didukung dengan sistem *carrying capacity* dengan memaksimalkan pemasaran, penguatan narasi dan keterlibatan masyarakat dan *stakeholder*.

Urgensi lainnya terletak pada integrasi ekoteologi Hindu sebagai wujud konservasi lingkungan yang dapat menghadirkan pengalaman wisata ekologis bernuansa spiritual yang dapat menarik segmen pasar spiritual tourism (Eagles, McCool & Haynes, 2002). Secara teoretis, penelitian ini penting untuk memperkaya literatur tentang pluralistik agama, khususnya bagaimana nilai spiritual dapat diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan pariwisata dengan melibatkan penduduk lokal. Pendekatan ini relevan untuk studi konflik budaya, manajemen warisan, dan pembangunan berkelanjutan yang menuntut sensitivitas terhadap dinamika sosial lokal (Smith, 2006; Harrison, 2013).

Penelitian mengenai pengembangan Desa Wisata selama ini lebih banyak berfokus pada penerapan *Community Based Tourism* (CBT), penguatan kelembagaan lokal, partisipasi masyarakat, strategi pemasaran, serta tata kelola destinasi berkelanjutan (Tosun, 2006; Paresashvili, 2016; Pertiwi et al., 2023; Rozi & Lemy, 2023). Sementara itu, kajian mengenai identitas budaya dan religius umumnya menempatkan nilai budaya sebagai instrumen pembentuk daya saing destinasi Korov (2024) tanpa mengintegrasikannya secara sistematis dengan konservasi ekologis dan dinamika sosial masyarakat multireligius.

Hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang mengembangkan strategi pengelolaan Desa Wisata dengan mengintegrasikan warisan budaya Hindu, ekosistem hutan

lindung, dan tata kelola kolaboratif dalam konteks pluralisme agama sebagaimana terdapat di Desa Suranadi. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui perumusan model strategi pengembangan Desa Wisata budaya-ekologis yang mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologi Hindu, konservasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan destinasi berkelanjutan sebagai satu kerangka yang adaptif terhadap kondisi sosial-keagamaan lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh gambaran mendalam tentang strategi pengembangan Desa Wisata Suranadi. Penelitian dilaksanakan pada kawasan Desa Wisata Suranadi di Kabupaten Lombok Barat. Sumber data primer diperoleh dari wawancara semi-struktural dengan informan kunci yang dipilih secara *purposive* (Kepala Desa, pemuka agama setempat, pelaku *homestay* dan usaha kreatif) diperkuat dengan teknik *snowball* untuk menjaring informan tambahan yang relevan. Untuk mengetahui perspektif pengunjung, sampel wisatawan dikumpulkan melalui *accidental sampling* pada titik-titik kunjungan. Instrumen penelitian terdiri dari pedoman wawancara, dan lembar observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif pada kegiatan ritual keagamaan, pada pelaku dan kegiatan usaha. Kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik untuk merumuskan temuan sementara. Analisis data dilakukan dengan transkripsi wawancara, pemetaan tokoh dan pemuka agama, evaluasi kondisi infrastruktur dan aksesibilitas. Tahap selanjutnya dilakukan integrasi temuan ke dalam matriks SWOT untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kondisi internal dan eksternal sehingga alternatif strategi SO, WO, ST, dan WT. Strategi yang dihasilkan selanjutnya diintegrasikan dengan analisis zonasi atraksi dan layanan berdasarkan prinsip *Tripartite Attraction Design* dan tipologi Desa Wisata sebagai dasar penyusunan rekomendasi pengembangan Desa Wisata Suranadi yang berkelanjutan, berbasis budaya, ekologi, dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Pengembangan Desa Wisata Suranadi sebagai destinasi berkelanjutan memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara aset budaya yang bersifat *tangible* dan *intangible* dengan ekosistem biotik dan abiotik yang ada di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menguraikan dinamika pengembangan melalui struktur sistematis berdasarkan rumusan strategi yang diusulkan.

1. Identifikasi Modal Wisata Desa Suranadi

Desa Suranadi memiliki profil yang unik didasari atas lokus spiritualitas Hindu di Pulau Lombok, selain itu pada kawasan hutan lindung penyangga Desa Suranadi memiliki keanekaragaman hayati. Antara lokus spiritual Hindu dan kelestarian alam menjadikan Desa Suranadi sebagai basis diferensiasi destinasi yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Sebagai warisan budaya *tangible* yang memiliki nilai historis, spiritual, dan sosial adalah petirtaan, yakni tempat pengambilan air suci atau pemandian suci (Budiasih, 2025). Berdasarkan temuan lapangan dan kajian literatur, identifikasi ekoteologi di Desa Suranadi hendaknya dimulai dengan menginventarisasi aset *tangible* dan *intangible* dalam satu kerangka lanskap.

Secara fisik lokasi yang didokumentasikan ada empat Pura utama (*Ulon*, *Pengentas*, *Pebersihan* dan *Majapahit*) selain lokasi Pura, dokumentasi juga dilakukan untuk melihat kondisi bangunan, elemen arsitektural, titik *Panca Tirta* (lima mata air suci), jalur

penghubung, serta artefak ritual. Secara non-fisik dilakukan dokumentasi narasi sejarah Dang Hyang Dwijendra yang berkaitan dengan tempat melukat, kalender upacara, aturan adat pengelolaan mata air, serta pengetahuan lokal tentang konservasi hutan. Perolehan data secara fisik dan non-fisik memberikan gambaran bahwa kondisi dari Desa Wisata Suranadi sangatlah identik dan memiliki hubungan erat dengan tradisi Hindu.

Potensi wisata yang ditonjolkan didukung oleh unsur pengelolaan destinasi spiritual yang mengintegrasikan dimensi budaya, spiritualitas, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal (Putra, et al., 2021). Dari sisi ekologi, *Panca Tirta* difungsikan sebagai irigasi, pemenuhan rumah tangga serta sebagai pusat makna religius. Untuk mengintegrasikan ekoteologi ke dalam produk wisata yang berkelanjutan direkomendasikan pengembangan paket terstandar yang menggabungkan interpretasi ritual dan kegiatan konservasi: misalnya *Eco-Spiritual Walk* (kunjungan berpemandu ke Pura *Ulon* dan Pura *Pabersihan*) dengan penjelasan terkait legenda yang melekat pada dua Pura tersebut.

Penjelasan terkait legenda akan memberikan dampak kepada wisatawan agar dapat mematuhi tata krama selama berkunjung di lokasi yang disucikan/ zona spiritual. Berdasarkan beberapa modal utama yang dimiliki Desa Wisata Suranadi, perlu dibuatkan sebuah sistem pengelolaan dan organisasi pengelola daya tarik wisata mengarah pada model *co-management* atau multi pemangku kepentingan yang saling bersinergi antara Pokdarwis, pemangku adat Hindu, perwakilan komunitas Sasak, pengelola hutan lindung, dan pemerintah kabupaten dengan penugasan yang jelas. Pendapatan dari hasil pengelolaan yang akuntabel dibagikan melalui *Community Benefit Fund* yang dikelola secara transparan, mekanisme bagi hasil tiket dan paket.

Untuk mewujudkan pengelolaan Desa Wisata Suranadi yang akuntabel, dilakukan peningkatan kompetensi manajemen destinasi untuk pengurus Pokdarwis, sertifikasi pemandu lokal (modul budaya, ekologi, keselamatan), dan forum kerukunan lintas-agama untuk mencegah marginalisasi pemilik warisan. Dari sisi infrastruktur dan manajemen kunjungan perlu diterapkan zonasi tiga lapis (Zona Sakral dengan akses terbatas dan kunjungan terjadwal, Zona *Buffer* untuk jalur interpretasi dan titik observasi; Zona Publik/komersial untuk *homestay* dan pasar kerajinan), perancangan jalur pejalan ramah lingkungan menggunakan material lokal, fasilitas sanitasi terpisah, papan informasi dwi bahasa, serta sistem reservasi *online* untuk mengendalikan kapasitas tampung harian dan menghindari gangguan ketika pelaksana upacara; patroli gabungan pokdarwis-pengelola hutan dan sistem sanksi lokal diperlukan untuk mencegah kerusakan dan pengambilan air ilegal.

Pengelolaan wisata berkelanjutan tidak dapat terlepas dari faktor-faktor penghambat yang berisiko. Beberapa risiko yang dapat muncul dari pengelolaan daya tarik wisata berbasis agama dan budaya yaitu, risiko komodifikasi budaya, konflik lintas-agama, dan dampak ekologis dari padatnya kunjungan. Sebagai upaya penanggulangan khususnya terhadap dampak lingkungan perlu dimitigasi melalui kebijakan pembatasan aktivitas komersial di zona sakral dengan mengadakan perjanjian tertulis untuk memasuki situs, program edukasi antar komunitas, pembatasan kapasitas pengunjung dalam menjaga keaslian ekologis, dan dibantu dengan mekanisme pembagian kompensasi yang adil sesama pengelola.

Agar konsistensi pengelolaan Desa Wisata tetap stabil dan terkendali, dapat dibuatkan monitoring terintegrasi meliputi aspek lingkungan (debit dan kualitas air, tutupan vegetasi, jumlah sampah per kunjungan), aspek sosial (persentase rumah tangga terlibat, persepsi manfaat budaya dan ekonomi, jumlah konflik yang dilaporkan), dan aspek ekonomi (pendapatan rata-rata satu *homestay*, kontribusi ke *Community Benefit Fund*, lapangan kerja

lokal). Secara operasional langkah awal yang mendesak adalah menyelesaikan inventarisasi fisik dan non-fisik, menyusun GIS (peta zonasi), merumuskan aturan berprilaku dan etika yang ditandatangani pemangku adat, serta membentuk forum *co-management*.

Langkah menengah meliputi sertifikasi pemandu, perbaikan jalur dan sanitasi, dan peluncuran paket wisata terstandar, sementara langkah jangka panjang fokus pada sistem monitoring lingkungan sosial ekonomi yang berkelanjutan, penguatan *Community Benefit Fund*. Berdasarkan pemetaan potensi dan upaya pengelolaan Desa Wisata Suranadi dapat mempertahankan otoritas budaya sekaligus meningkatkan konservasi hutan lindung dan kesejahteraan komunitas melalui pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable*).

2. Potensi Ekologis Taman Wisata Alam Suranadi

Potensi ekologis Desa Suranadi terletak pada kawasan hutan lindung dan taman wisata alam yang memiliki topografi datar hingga bergelombang. Kawasan ini merupakan daerah tangkapan air (*catchment area*) yang krusial bagi ketersediaan air bersih di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Berdasarkan karakteristik tersebut, potensi ekologis Taman Wisata Alam (TWA) Suranadi harus dianalisis dan dikelola sebagai sistem ekohidrologis yang kompleks dan multi-fungsi. Jika dilihat dari sisi lanskap dan tanah, dominasi tanah mediteran coklat yang subur memungkinkan regenerasi vegetasi hutan hujan tropis yang rapat sehingga kawasan memiliki kapasitas tinggi untuk penyimpanan karbon, penyerapan air hujan, dan pencegahan erosi, perlu juga melakukan analisis kestabilan tanah perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area rawan longsor.

Unsur penting lainnya dalam ekologis yaitu keanekaragaman hayati yang mencakup flora dan fauna untuk menentukan spesies indikator, status konservasi, dan fungsi ekologis khususnya populasi binatang primata (monyet) yang berinteraksi dengan manusia dan dapat menjadi aset edukasi sekaligus sumber konflik. Perlu dibuatkan strategi mitigasi serangan hewan terhadap manusia, selain itu sistem pengelolaan sampah juga penting dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pengalaman pengunjung dan kesejahteraan satwa. Potensi utama *Panca Tirta* dan sungai jernih yang bersumber dari rembesan lereng Gunung Rinjani menempatkan TWA Suranadi sebagai infrastruktur alam penting bagi ketahanan air lokal.

Kualitas air perlu dilakukan monitoring hidrologi (debit musiman, tingkat infiltrasi, kualitas air, pH, kekeruhan, parameter mikrobiologis) serta pemetaan penggunaan lahan hulu wajib dilakukan untuk mendeteksi tekanan antropogenik seperti konversi lahan, pengambilan air ilegal, atau polusi domestik. Monitoring sumber mata air ini bertalian erat dengan kesepakatan setempat yang mengatur bahwa merusak hutan berarti merusak kesucian sumber air. Kesepakatan lokal ini sejatinya dapat diadopsi menjadi aturan pengelolaan formal (peraturan desa tentang konservasi berbasis adat), dengan begitu kearifan lokal menjadi instrumen konservasi yang diakui secara hukum dan diintegrasikan ke dalam rencana pengelolaan TWA.

Perspektif pengembangan pariwisata berkelanjutan juga menjadi hal penting dalam menjaga sistem ekologis TWA Suranadi. Penetapan zona ekologis harus diterapkan dengan pola: zona inti konservasi (perlindungan ketat sumber air dan habitat sensitif), zona penyangga edukasi (jalur interpretasi, titik observasi satwa, stasiun monitoring), dan zona pemanfaatan rendah dampak (area piknik terkontrol, *homestay* di pinggiran). Penerapan zona ekologis ini membantu menjaga keaslian lingkungan di kawasan TWA Suranadi. Upaya pemertahanan keaslian ekologis dapat dilakukan dengan mengukur tampung yang dihitung berdasarkan indikator ekologis dan sosial, sistem reservasi minimum, jalur-jalur berpemandu, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan (toilet kompos, pengelolaan limbah

terpisah). Perlindungan terhadap TWA Suranadi tentu berkaitan erat dengan konsep *Tri Hita Karana*. Konsep *tri hita karana* hadir sebagai sebuah kearifan lokal yang bersifat universal dalam pengimplementasiannya (Suryawan, et al., 2022).

Aspek *Palemahan* sebagai dasar harmonisasi hubungan manusia dengan alam dapat diwujudkan dari pola dan skema penerapan zona ekologis. Sejalan dengan konsep *Tri Mandala: utama, madya* dan *nista* (Riyanto & Bhattacharya, 2022). Zona ekologis membagi batas-batas antara provan dan sakral dalam penataan ruang pada kawasan TWA Suranadi. *Tri Mandala* dibagi menjadi tiga, *Nista Mandala (Kanistama)*, merupakan zona terluar yang berfungsi sebagai area peralihan atau zona tidak suci. *Madya Mandala* merupakan zona tengah yang menjadi area peralihan antara manusia dan Tuhan. Dan terakhir *Utama Mandala* merupakan zona terdalam dan paling suci. Jadi titik temu integrasi antara ekologi dan spiritual Hindu terletak pada penyatuan antara konsep zona ekologis dengan *Tri Mandala* yang mengacu pada aspek *palemahan* dalam *tri hita karana*. Pariwisata spiritual dapat dikelola secara berkelanjutan, sekaligus menjadi acuan dalam mengembangkan pendekatan integratif antara dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam konteks pariwisata berbasis nilai-nilai lokal (Wulandary & Kampana, 2018). Daya tarik wisata alam memiliki ancaman yang datang dari alam itu sendiri. Dampak perubahan iklim tersebut terasa terutama pada pariwisata alam, seperti gunung, pantai, laut, dan sungai (Suwanto, 2011).

Seperti perubahan iklim (perubahan pola curah hujan dan kemarau panjang) memerlukan rekayasa adaptasi terhadap cuaca misalnya, konservasi air berbasis lanskap, peningkatan kapasitas resapan, dan diversifikasi mata pencaharian lokal agar ketahanan sosial-ekologis terjaga. Keberlanjutan TWA Suranadi juga bergantung pada finansial dan teknis pengelolaan. Sumber pendanaan direkomendasikan didapat dari alokasi APBD untuk infrastruktur dasar konservasi alam, hibah konservasi, serta pendapatan pariwisata yang dialokasikan sebagian ke program konservasi. Seluruh tata kelola harus dirancang partisipatif, berbasis bukti, dan menghormati pemangku adat, sehingga TWA Suranadi berfungsi simultan sebagai ruang konservasi satwa dan fauna, penopang ketahanan air regional, dan destinasi ekowisata berkelanjutan.

3. Analisis Kelembagaan, Ekonomi Kreatif, dan Dampak Pariwisata

Pilar dari strategi pengembangan berkelanjutan berkaitan dengan peran masyarakat lokal dalam mengelola potensi yang ada serta sejauh mana manfaat ekonomi dapat terserap secara merata. Hubungan kelembagaan ini merupakan bagian integral yang bersifat vital dalam memanajemen dan memitigasi potensi yang dapat menurunkan citra Desa Wisata. Berikut merupakan analisis peran *stakeholder* dalam pengembangan TWA Suranadi:

a. Evaluasi Kelembagaan Pokdarwis dan Partisipasi Masyarakat

Organisasi Kelompok Sadar Wisata *Wana Tirta Suranadi* di Desa Suranadi telah dibentuk tahun 2011, namun hingga sekarang belum terlihat perubahan signifikan pada Desa Wisata Suranadi. Berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan, promosi daya tarik wisata di Desa Suranadi sangat kurang, baik melalui media cetak, elektronik maupun media sosial, sehingga potensi-potensi wisata jarang diketahui secara luas. Dibandingkan dengan minimnya pengelolaan, partisipasi masyarakat di Desa Suranadi justru sangat tinggi sesuai dengan semangat CBT. Sikap masyarakat dalam perannya mengembangkan Desa Suranadi sangat vital menurut I Nyoman Adwisana selaku Kepala Desa Suranadi menyatakan bahwa sikap masyarakat sejak dahulu hingga sekarang menerima wisatawan bahkan mengharapkan kunjungan selalu ramai, karena dapat menimbulkan dampak positif untuk perekonomian (Wawancara, 25 September 2025).

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh I Gusti Lanang Tusan selaku pemilik jasa penginapan Villa Bunga menyatakan bahwa Desa Suranadi telah ada sejak jaman Belanda, bahkan pernah jaya pada dekade 1990-an, karena banyak persaingan wisata baru di Lombok, sekarang daya tarik wisata Suranadi cenderung mengalami penurunan wisatawan. Selaian *stakeholder* pemerintah dan pengusaha jasa wisata, Elly Nurramah selaku penjual kuliner sate Bulayak mengatakan sangat mengharapkan kedatangan wisatawan dalam jumlah besar sehingga meningkatkan kunjungan ke warung makan sate Bulayaknya (Wawancara, 25 September 2025). Hal yang sama juga disampaikan oleh Ida Made Swastika selaku pengempon ketua *pengempon* pura Suranadi menyatakan bahwa kami sangat mendukung dan menerima masuknya pariwisata di desa kami dengan syarat tidak menjadikan Pura Suranadi sebagai cagar budaya (Wawancara, 25 September 2025). Dari berbagai komponen dan unsur masyarakat ini dapat dijabarkan beberapa faktor yang menghambat kemajuan wisata di Desa Suranadi yaitu, pertama masalah struktural dan manajerial, belakangan ini terdapat indikasi stagnasi kreativitas pariwisata jika dibandingkan dengan masa kejayaan pariwisata Suranadi pada era 1990-an.

Masalah utama desa Suranadi mencakup kurangnya sosialisasi secara modern yang bersifat digital pada platform sosial media, adanya keterbatasan anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi antara pengelola pura, pemerintah desa, dan pengelola hutan lindung. Hal ini menyebabkan pengembangan fasilitas terasa stagnan dan tidak terencana secara holistik. Septadiani et al., (2022) mengamati peran model *pentahelix* dalam pengembangan pariwisata di kawasan ekonomi khusus Mandalika, ditemukan bahwa model *pentahelix* memainkan peran penting dalam pengembangan pariwisata di KEK Mandalika. Pelibatan *pentahelix* penting dilakukan dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Suranadi. Kedua, tingkat partisipasi masyarakat lokal: meskipun keterlibatan dalam sektor jasa (seperti pedagang kuliner dan pengelola kolam) cukup tinggi, namun partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan strategis masih tergolong dalam kategori sedang. Masyarakat cenderung hanya mengikuti arahan kebijakan dari pemerintah daerah tanpa memiliki daya tawar yang kuat dalam menentukan arah pengembangan destinasi di wilayah mereka sendiri. Kreativitas masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata di desa Suranadi sejatinya dapat ditingkatkan dengan penyertaan modal finansial dari anggaran pokdarwis dari dana desa.

Secara terstruktur sebelum memberikan bantuan pendanaan untuk usaha wisata, Pokdarwis dapat melakukan pelatihan pengelolaan Desa Wisata dan pelatihan pembuatan produk kreatif sebagai produk unggulan baru yang memiliki daya tawar kepada para wisatawan. Ketiga, Dalam usaha mempromosikan Desa Wisata Suranadi, selain dapat dilakukan melalui media digital, dapat juga dilakukan dalam bentuk festival yang mempromosikan sebagian atau keseluruhan potensi Desa Suranadi. Festival ini bisa dilakukan dengan menampilkan panganan dan kuliner lokal, ritual melukat, atraksi budaya bahkan tracking pada hutan lindung desa Suranadi. Festival Suranadi dipastikan dapat berjalan lancar dengan menggandeng pemerintah dan mitra swasta sebagai sponsor.

b. Sektor Agrowisata dan Ekonomi Kreatif Desa Suranadi

Salah satu kekuatan ekonomi Suranadi yang belum tergarap maksimal adalah sektor agrowisata berbasis buah-buahan unggulan. Wilayah Narmada, termasuk Suranadi, dikenal dengan penghasil buah manggis, durian, dan rambutan. Di antara ketiga jenis buah tersebut, sebagai penghasil buah Manggis, Desa Wisata Suranadi dapat menjadikan manggis sebagai ikon buah lokal karena Manggis (*Garcinia mangostana L.*) memiliki cita rasa khas yang diakui secara internasional sebagai *Queen of Tropical Fruits*. Keberadaan pohon manggis telah dilakukan penanaman secara masif sejak era 1980-an.

Uniknya, pohon manggis di Suranadi sering kali dikaitkan dengan filosofi kerukunan; kulit luarnya yang hitam dan isinya yang putih bersih melambangkan kejujuran masyarakat setempat, sementara bentuk cabangnya melambangkan keberagaman suku. Dilekatkannya buah manggis dengan folosofi kerukunan, menjadikan buah manggis semakin kuat dan layak dijadikan ikon Desa Suranadi. Selain penghasil buah-buahan, masyarakat Desa Suranadi memiliki industri rumahan, terutama produksi dodol buah (nangka, sirsak, durian, dan pisang). Selain itu, kuliner khas seperti sate Bulayak, dan plecing kangkung menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tabel sebaran produk ekonomi kreatif di bawah memperlihatkan potensi kuliner dan akomodasi pariwisata di Desa Suranadi.

Tabel 1. Sebaran Pelaku Ekonomi Kreatif di Desa Wisata Suranadi

Jenis Usaha	Lokasi Dominan	Kontribusi terhadap Wisata
Pedagang (Sate Bulayak)	Kuliner Sekitar Area Parkir Pura	Menyediakan amenitas utama bagi pengunjung dan mendorong peningkatan belanja wisatawan.
Industri (Dodol Buah)	Rumahan Lingkungan Pemukiman	Produk buah tangan autentik; memperkuat rantai pasok pertanian lokal.
Penyewaan Rekreasi (Camping)	Alat Sekitar Hutan Lindung	Mendukung aktivitas ekowisata dan masa tinggal wisatawan.
Homestay Penginapan	dan Dusun Suranadi Selatan	Memungkinkan interaksi budaya langsung; meningkatkan durasi kunjungan.

Sumber: Peneliti, 2025

Adanya aktivitas ekonomi ini memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kualitas infrastruktur dan akses yang saat ini dilaporkan mengalami kerusakan di beberapa titik. Kerusakan infrastruktur tidak hanya menurunkan minat kunjungan tetapi juga menghambat distribusi produk pertanian masyarakat ke pasar yang lebih luas.

4. Implementasi *Tripartite Attraction Design* Dalam Penataan Destinasi

Guna menjaga keseimbangan antara kebutuhan spiritual umat Hindu, konservasi ekologis, dan aktivitas rekreasi wisatawan, penelitian ini mengusulkan penerapan model penataan ruang berbasis *Tripartite Attraction Design* yang dikembangkan oleh (Gunn & Var 2002). Model ini membagi area daya tarik wisata menjadi tiga zona fungsional untuk memudahkan pengaturan sirkulasi dan perlindungan aset utama.

- Area Nucleus* (Zona Inti): Merupakan daya tarik utama yang menjadi alasan wisatawan berkunjung. Di Suranadi, *nucleus* adalah sumber mata air suci (*Panca Tirta*) dan bangunan suci Pura. Area ini harus dikembangkan seautentik mungkin dan dilingkupi aturan ketat untuk menjaga kesuciannya, seperti pembatasan jumlah orang, penggunaan pakaian adat tertentu, dan larangan aktivitas yang bising.
- Inviolate Belt* (Zona Penyangga): Merupakan area penyangga yang memberikan persepsi awal bagi wisatawan sebelum memasuki area inti. Di Suranadi, hutan lindung yang mengelilingi pura berfungsi sebagai *inviolate belt*. Zona ini tidak boleh memiliki bangunan komersial permanen agar suasana sakralitas tetap terjaga. Aktivitas yang diperkenankan di sini adalah trekking ringan dan edukasi konservasi.
- Zone of Closure* (Zona Penutup/Fasilitas): Merupakan area di mana fasilitas penunjang seperti parkir, toilet, pusat informasi, dan warung makan ditempatkan. Zona ini berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi agar tidak mengganggu ketenangan di area *nucleus*. Penataan pedagang sate bulayak dan dodol harus dipusatkan di zona ini secara rapi agar tidak menciptakan polusi visual dan sampah di dekat area suci.

5. Strategi Harmonisasi Sosial dan Modal Sosial Lintas Agama

Salah satu aspek krusial dalam pariwisata berkelanjutan di Suranadi adalah pengelolaan hubungan antar-agama. Suranadi merupakan pemukiman di mana komunitas Hindu etnis Bali dan komunitas Muslim etnis Sasak hidup berdampingan.

a. Harmonisasi Lintas Agama

Keharmonisan di Suranadi bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi sosial yang panjang berbasis kearifan lokal. Masyarakat menggunakan Adat Tapsila sebagai pedoman perilaku harian. Adat Tapsila merupakan aturan tata krama dan etika yang dipegang teguh oleh masyarakat suku sasak. Terdapat empat nilai utama dalam adat ini: *malik* (pantangan berbuat tercela), *merang* (setia kawan dan empati), *patut* (selalu berbuat benar di mata masyarakat), dan *patuh* (rukun terhadap sesama). Nilai-nilai ini menjadi jangkar sosial yang mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pariwisata.

Selain Adat Tapsila, interaksi antar-umat beragama diperkuat melalui penggunaan bahasa Sasak yang halus (*Sasak Alus*) dan penghormatan terhadap hari besar masing-masing. Dari perspektif kohesi sosial, hubungan antara masyarakat *Wetu Telu* dan masyarakat Hindu mencerminkan kemampuan masyarakat untuk membangun rasa saling memiliki (*sense of belonging*), solidaritas, dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan suatu nilai yang positif terhadap lingkungan serta agama sebagai pegangan hidup dalam diri manusia (Ariska et al., 2020).

Kohesi tersebut tercermin dalam keterlibatan kedua komunitas pada berbagai aktivitas sosial dan budaya, seperti tradisi gotong royong, pelaksanaan upacara adat, pengelolaan sumber daya bersama, hingga penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah. Interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan menciptakan *bridging social capital*, yaitu bentuk modal sosial yang menghubungkan kelompok-kelompok dengan latar belakang identitas berbeda sehingga menghasilkan hubungan yang inklusif dan memperkuat integrasi sosial.

Dengan demikian, keberagaman agama justru menjadi sumber penguatan kohesi sosial karena dibangun di atas pengalaman hidup bersama dan saling menghormati. Oleh karena itu, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya yang memfasilitasi kerja sama, tetapi juga menjadi mekanisme yang menjaga stabilitas hubungan antarumat beragama. Dengan kata lain, keberadaan *Wetu Telu* dan agama Hindu di Lombok merupakan contoh bagaimana kohesi sosial dibangun melalui modal sosial yang berakar pada kearifan lokal, sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkelanjutan tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing.

b. Kesenian Genggong sebagai Simbol Persatuan

Kesenian tradisional Genggong memainkan peran unik sebagai instrumen perekat toleransi. Alat musik ini terbuat dari pelepah pohon aren yang dimainkan dengan tarikan tali dan getaran mulut. Sebagai kesenian yang dimainkan oleh dua kelompok identitas budaya, genggong dapat dijadikan identitas kolektif dan simbol persatuan antara masyarakat wetu telu dan Hindu Lombok. Genggong dimainkan bersama oleh warga Hindu dan Muslim di Suranadi untuk menghibur diri setelah bekerja sebagai petani. Irama yang dihasilkan menyerupai suara katak yang bersahut-sahutan, irama dan nada ini memberikan kesan kedekatan dan keharmonisan yang melambangkan kegembiraan komunal tanpa memandang perbedaan iman.

Meskipun merepresentasikan keharmonisan dua unsur agama, saat ini, kesenian genggong mengalami terancam punah karena kurangnya minat generasi muda dan minimnya panggung atraksi. Strategi pengembangan destinasi harus memasukkan Genggong sebagai salah satu atraksi seni reguler dalam paket wisata untuk memastikan keberlangsungan warisan leluhur ini sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengalaman wisatawan. Selain dapat dijadikan paket wisata, kesenian genggong merupakan seni pertunjukan yang dapat dipentaskan atau dipromosikan dalam acara-acara besar kedaerahan seperti dalam sebuah festival-festival budaya. Untuk meningkatkan minat generasi muda dalam kesenian genggong, pemerintah desa Suranadi dapat melaksanakan lomba kesenian genggong antar karang taruna atau antar desa.

6. Formulasi Strategi SWOT dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan seluruh temuan di atas, dirumuskan strategi pengembangan Desa Wisata Suranadi yang komprehensif melalui pendekatan matriks SWOT.

a. Matriks Strategi Pengembangan

Table 2. Matriks Strategi SWOT Desa Wisata Suranadi

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Faktor Eksternal	Aset spiritual Pura & <i>Panca Tirta</i> ; Hutan lindung yang subur; Kerukunan Sasak-Bali yang kuat; Produk unggulan.	Pokdarwis stagnan; Infrastruktur akses rusak; Minimnya fasilitas informasi digital; Ketergantungan pada wisatawan lokal.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
Tren wisata berkelanjutan & <i>ecotourism</i> ; Dukungan Peraturan Bupati; Pertumbuhan pasar halal- <i>cultural tourism</i> ; Investasi infrastruktur daerah	Mengembangkan paket wisata spiritual-ekologis terintegrasi; Memanfaatkan status Desa Wisata untuk menarik dana hibah konservasi.	Melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur; menggiatkan Pokdarwis dan masyarakat lokal dalam memasyarakatkan Sapta Pesona.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
Persaingan dengan destinasi lain (Sesaot, Lingsar); Risiko komodifikasi budaya; Perubahan iklim (kekeringan); Alih fungsi lahan.	Menjadikan kearifan lokal sebagai basis konservasi hutan; Memperkuat identitas Suranadi sebagai pusat spiritualitas yang autentik.	Membina sanggar kesenian lokal untuk melindungi warisan budaya; mewujudkan pemberdayaan masyarakat; promosi pariwisata dan budaya di platform sosial media.

Sumber: Peneliti, 2025

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Suranadi perlu diawali dengan strategi yang berorientasi pada optimalisasi potensi internal melalui pengembangan wisata spiritual-ekologis, penguatan kelembagaan Pokdarwis, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi digital. Penetapan prioritas strategi ini menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan daya saing destinasi.

Di sisi lain, implementasi strategi memerlukan sinergi antara pemerintah, pengelola desa wisata, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ancaman terhadap kelestarian budaya maupun lingkungan. Oleh karena itu, hasil analisis SWOT dapat menjadi dasar dalam penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan Desa Wisata Suranadi yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga mampu memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

Strategi pengembangan Desa Wisata Suranadi diprioritaskan pada strategi S-O dengan mengoptimalkan aset spiritual Pura dan *Panca Tirta*, hutan lindung, kerukunan Sasak-Bali, serta produk unggulan untuk mengembangkan paket wisata spiritual-ekologis yang mendukung tren pariwisata berkelanjutan dan memanfaatkan peluang pendanaan Desa Wisata. Prioritas berikutnya adalah strategi W-O melalui revitalisasi Pokdarwis, peningkatan kapasitas masyarakat dalam penerapan Sapta Pesona, digitalisasi informasi wisata, serta perbaikan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing destinasi. Selanjutnya, strategi S-T diarahkan untuk menguatkan identitas Desa Suranadi sebagai destinasi spiritual berbasis kearifan lokal yang mendukung konservasi lingkungan, sedangkan strategi W-T berfokus pada pembinaan sanggar seni, pemberdayaan masyarakat, dan promosi digital untuk menjaga kelestarian budaya serta memperluas pasar wisata.

Implementasi strategi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya kelembagaan Pokdarwis, keterbatasan infrastruktur dan pendanaan, serta risiko komodifikasi budaya dan dampak perubahan iklim pada TWA Suranadi. Selain itu, meningkatnya persaingan dengan destinasi lain menuntut inovasi produk wisata, penguatan branding, dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pengelola Desa Wisata, masyarakat lokal, serta pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengembangan Desa Wisata Suranadi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal.

b. Rekomendasi Tindak Lanjut bagi Pemangku Kepentingan

Desa Suranadi telah ditetapkan sebagai Desa Wisata Budaya melalui Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kawasan Desa Wisata. Desa Wisata Suranadi memiliki integrasi antara nilai-nilai ritual dan kelestarian alam yang mana tidak dimiliki oleh wilayah lain. Berdasarkan integrasi nilai ritual dan kelestarian alam disertai temuan lapangan, rekomendasi operasional bagi pemangku kepentingan harus dirumuskan sebagai regulasi yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan oleh pelaku wisata di Suranadi. Adapun rekomendasi tindak lanjut bagi pemangku kepentingan sebagai berikut pertama, penguatan *Community Based Tourism* (CBT) harus dilakukan melalui pelatihan bagi Pokdarwis; mekanisme retribusi dan pembagian manfaat harus diatur dalam Peraturan Desa atau *MoU co-management* yang menetapkan persentase alokasi pendapatan (mis. 40% untuk *Community Benefit Fund*, 30% untuk operasional pengelolaan, 30% untuk insentif pemandu dan rumah tangga penyedia *homestay*), audit tahunan publik, serta mekanisme transparansi digital (dashboard pendapatan sederhana yang dapat diakses warga).

Kedua, revitalisasi infrastruktur berupa pembangunan fasilitas sanitasi ramah lingkungan (toilet, fasilitas cuci tangan dengan sistem *greywater* terkelola), ruang ganti dan bilik privasi di area pemandian sakral yang dirancang sesuai dengan aturan adat setempat yang tidak melanggar batas kesucian pura, serta titik evakuasi dan jalur akses darurat. Setiap proyek infrastruktur disertai studi dampak lingkungan sederhana dan rencana pemeliharaan jangka panjang yang dikelola bersama Pokdarwis dan pemerintah desa.

Ketiga, strategi branding dan diversifikasi produk harus menggabungkan narasi budaya dan ekologi. Dapat juga menerapkan branding *The Sacred Oasis of Lombok* dengan tata kelola yang mengutamakan lokasi *Panca Tirta*, kawasan pura, dan praktik konservasi di hutan lindung. Strategi lainnya dapat dilakukan dengan membuat portofolio produk terstandar (paket *Eco-Spiritual Walk*, *Homestay Ritual Immersion*, *Forest Bathing*, wisata edukasi pertanian seperti memetik manggis, pertunjukan seni Genggong berkala) dengan SOP pelaksanaan pengelolaan, harga tiket, standar kualitas layanan, dan memanfaatkan *platform* digital.

Keempat, harmonisasi lintas-agama harus diposisikan sebagai strategi tata kelola sosial. Mengadakan dialog reguler antara pemuka adat Hindu dan pemuka agama Sasak untuk menyusun protokol akses situs sakral, kalender kunjungan yang menghormati hari-hari upacara, dan mekanisme kompensasi bila terjadi gangguan. Merancang program edukasi toleransi yang melibatkan pertunjukan budaya bersama, paket kunjungan yang menampilkan kehidupan toleran Sasak-Bali.

Kelima, aspek operasional pendukung meliputi: (a) program pelatihan berjenjang untuk pemandu (budaya, ekologi, keselamatan) dan pelatihan *hospitality* untuk pelaku *homestay*; (b) sistem manajemen kunjungan berbasis reservasi *online* dan kuota harian untuk memasuki zona sakral; (c) aturan tertulis (cara berpakaian, larangan berfoto di tempat yang disucikan, tata cara partisipasi dalam kegiatan non-sakral) yang ditandatangani oleh pengelola daya tarik wisata; (d) mekanisme pengaduan dan mediasi cepat untuk menyelesaikan konflik sosial atau insiden lingkungan.

Keenam, indikator kinerja dan monitoring harus ditetapkan sejak awal: indikator lingkungan (debit dan kualitas air, tutupan vegetasi, indeks keanekaragaman), sosial (persentase rumah tangga terlibat, survei persepsi manfaat, jumlah konflik lintas-agama), dan ekonomi (lama tinggal rata-rata, pendapatan per *homestay*, kontribusi ke *Community Benefit Fund*); data dikumpulkan secara berkala melalui monitoring partisipatif yang melibatkan mahasiswa/LSM dan dilaporkan dalam rapat tahunan *co-management* untuk pengelolaan yang adaptif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama Desa Wisata Suranadi yakni penurunan daya saing akibat kelemahan kelembagaan (Pokdarwis), kurang memadainya infrastruktur, dan risiko komodifikasi budaya dapat diatasi melalui strategi yang mengintegrasikan ekoteologi Hindu dengan konservasi ekologi. Temuan menunjukkan perlunya inventarisasi terstandar aset *tangible* dan *intangible*, peta GIS zonasi, serta *model co-management* antar *stakeholder* terakit. Strategi yang diusulkan bersifat operasional dan berjenjang: zona ekologis (zonasi tiga lapis) untuk mengendalikan kunjungan wisatawan. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Desa Wisata Suranadi memiliki potensi yang kuat untuk dikembangkan melalui pemanfaatan aset spiritual, kekayaan alam, kerukunan sosial, dan produk lokal yang didukung oleh peluang berkembangnya pariwisata berkelanjutan serta kebijakan pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, strategi *Strengths-Opportunities* (S-O) menjadi prioritas utama karena dinilai paling efektif dalam mengoptimalkan potensi yang ada melalui pengembangan wisata spiritual-ekologis yang terintegrasi, didukung penguatan kelembagaan, peningkatan infrastruktur, dan digitalisasi layanan wisata.

Daftar Pustaka

- Ariska, F., Atmadja, N. B., & Margi, I. K. (2020). Keharmonisan Sosial Pada Masyarakat Multietnis Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi (Di Desa Celukanbawang, Buleleng, Bali). *JPSU: Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 2(1), 63-72.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical Research On The Governance Of Tourism And Sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4-5), 411-421.
- Budiasih, N. G. A. N., Sutrisnawati, N. K., Ardiasa, I. K., Wijayasa, I. W., & Putri, A. S. A. S. (2025). Pelestarian Tradisi Petirtaan Kanto Lampo sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan di Desa Beng, Gianyar. *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*, 5(2), 13-36.
- Cohen, E. (1988). Authenticity And Commoditization In Tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371-386.
- Eagles, P. F. J., McCool, S. F., & Haynes, C. D. (2002). *Sustainable Tourism In Protected Areas: Guidelines For Planning And Management*. Gland: IUCN-The World Conservation Union.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245.
- Goodwin, H., & Santilli, R. (2009). Community-Based Tourism: A Success?. *ICRT Occasional Paper*, 11, 1-37.
- Gunn, C. A., & Var, T. (2002). *Tourism Planning: Basic, Concepts, Case*. New York: Routledge.
- Hall, C. M. (2008). *Tourism Planning: Policies, Processes And Relationships*. London: Pearson Education.
- Harrison, R. (2013). *Heritage: Critical Approaches*. Abingdon-on-Thames: Routledge.
- Henderson, J. C. (2016). Halal Tourism, The Rise Of The Muslim Traveller And The Hospitality Industry. *International Journal Of Tourism Research*, 18(6), 556-567.
- Korov, T., Šostar, M., & Andrić, B. (2024). The Model Of Strategic Management Of A Religious Tourism Destination In Function Of Sustainable Development. *International Journal of Professional Business Review*, 9(4), 1-49.
- Lumanauw, N., & Prasiasa, D. P. O. (2024). Identifikasi Potensi Pariwisata Melalui Komponen Pariwisata Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary Di Desa Bongan, Bali. In *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 3, 1-12.
- McKercher, B. (2002). Towards A Classification Of Cultural Tourists. *International Journal of Tourism Research*, 4(1), 29-38.
- McKercher, B., & Du Cros, H. (2002). *Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism And Cultural Heritage Management*. Binghamton: The Haworth Hospitality Press.
- Paresashvili, N. (2016). Destination Management Role In Developing Tourism In Georgia. *World Science*, 4(8), 46-50.
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural Tourism And Touristic Culture*. California: Archipelago Press.
- Pertiwi, D. A. E., & Darma, G. S. (2023). Menelisik Model Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berbasis Sustainable Tourism Development. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(3), 1871-1879.
- Putra, I. G. N., & Suryani, N. M. (2019). Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Desa Wisata Di Lombok Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Lokal*, 5(1), 45-60.

- Putra, I., Maba, W., Widnyana, I. K., & Sudiana, A. A. (2021). The Management Model Of Masceti Pura Temple Area In Bali As A Spiritual Tourism Destination Based On Local Wisdom. *International Journal of Research-Granthaalayah*, 9(2), 291-298.
- Riyanto, E. D., & Bhattacharya, W. (2022). Tri Mandala: Kearifan Lokal Bali Dalam Pembagian Zonasi Dan Ruang Pada Bangunan Pura Di Kabupaten Sidoarjo. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 13(1), 108-119.
- Rozi, F., & Lemy, D. M. (2023). Pengembangan Model Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penyebaran Kunjungan Wisatawan di Kawasan Borobudur. *Masyarakat Pariwisata: Journal of Community Services in Tourism*, 4(1), 8-16.
- Sari, N. W. F. H., Semadi, G. N. Y., & Putra, D. P. K. E. (2024). Pengembangan Wisata Spiritual di Taman Beji Sudamala. *Jurnal Ilmiah Pariwisata dan Bisnis*, 3(8), 1380-1391.
- Septadiani, W. P., Pribadi, I. O. S., & Rosnarti, D. (2022). Peran Model Pentahelix Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. *Prosiding Seminar Intelektual Muda*, 4(1), 22-31.
- Suprpto, A. (2015). Revitalisasi Desa Wisata: Tantangan Dan Peluang. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 8(2), 77-92.
- Suryawan, I. P. P., Sutajaya, I. M., & Suja, I. W. (2022). Tri Hita Karana Sebagai Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*, 5(2), 50-65.
- Tosun, C. (2000). Limits To Community Participation In The Tourism Development Process In Developing Countries. *Tourism Management*, 21(6), 613-633.
- Tosun, C. (2006). Expected Nature Of Community Participation In Tourism Development. *Tourism Management*, 27(3), 493-504.
- Wulandari, A., & Adikampana, I. M. (2018). Pengelolaan Taman Mumbul Sebagai Daya Tarik Wisata Spiritual Di Desa Sangeh, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 369-374.
- Zahra, A., & Ryan, C. (2007). Muslim Tourists' Needs: What Don't We Know?. *Journal of Islamic Marketing*, 1(1), 9-15.